



Implementation of the Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation No. 81 of 2015 on the Village and Urban Village Development Evaluation Application (EPDESKEL): A Study of Five Nagari in Lubuk Basung District, Agam Regency, Indonesia

**Musfi Yendra¹, Doddie Arya Kusuma.B², Wahyudi³, Emi Handrina⁴, Eriandi⁵,
Riswanto Bakhtiar⁶, Serli⁷, Dodi Saftian Alamsyah⁸, Suryaningsih⁹, Rinawati¹⁰**

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: musfiyendra@gmail.com¹, aryakusumandoddie@gmail.com², wahyudi917@yahoo.com³,
emihandrina@gmail.com⁴, eriandi78@gmail.com⁵, haris.unespdg@gmail.com⁶, serli6421@gmail.com⁷,
Dodisaftianalamsyah65@gmail.com⁸, Aseh2309@gmail.com⁹, rinakery@gmail.com¹⁰

*Corresponding Author: musfiyendra@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation No. 81 of 2015 on Village and Urban Village Development Evaluation provides a policy framework for assessing the developmental progress of villages and urban villages. The implementation of the Village and Urban Village Development Evaluation Application (EPDESKEL) is expected to optimize local governance by enhancing the effectiveness and efficiency of coordination between local governments and village administrations. This study aimed to examine the implementation of the EPDESKEL application and its contribution to improving the quality of government supervision in five Nagari in Lubuk Basung District, Agam Regency, Indonesia. A qualitative research design with a descriptive approach was employed. The study involved five Nagari in Lubuk Basung District and officials from the Department of Community and Village Empowerment (DPMN) as research participants. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis and were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that the implementation of the Indonesian Ministry of Home Affairs Regulation No. 81 of 2015 through the EPDESKEL application has generally been carried out effectively in the Nagari of Lubuk Basung District and has produced positive outcomes for local governance and supervisory practices. Nevertheless, several challenges remain, including limited community participation and awareness regarding population administration, as well as the need for more intensive guidance and supervision from local government authorities. These findings suggest that strengthening institutional support and community engagement is essential for optimizing the implementation of EPDESKEL and achieving more effective village governance.

Keywords: Policy Implementation; EPDESKEL; Village Development Evaluation; Nagari; Lubuk Basung District.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah tidak serta-merta memberikan kewenangan dalam menentukan standar bahwa daerah tersebut berkembang atau tidak. Hal ini merupakan tugas dan hak dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat harus menetapkan standar daerah yang berkembang agar tidak adanya ketimpangan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan memberikan gambaran bagaimana pemantauan sebuah Desa untuk mengetahui seberapa berkembangnya suatu Desa maupun Kelurahan.

Kebijakan EPDESKEK merupakan salah satu langkah Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *e-Government* tipe G2G. dilihat dari fungsi dan manfaatnya, aplikasi ini dapat memudahkan Pemerintah dalam hal seperti pelaporan data Desa/Kelurahan, pengawasan infrastruktur Desa/Kelurahan, bahkan perumusan kebijakan terhadap Desa/Kelurahan.

Aplikasi EPDESKEK diperkenalkan pada Pemerintahan Kabupaten Agam Tahun 2018. Aplikasi EPDESKEK digunakan untuk mengevaluasi perkembangan Nagari (sebutan untuk desa di Sumatera Barat) berdasarkan data yang diinput oleh masing-masing Nagari. Diadakan sosialisasi terhadap 92 Nagari di Kabupaten Agam, salah satunya Nagari di Kecamatan Lubuk Basung dengan 5 (lima) nagari yakni Lubuk Basung, Garagahan, Kampung pinang, Kampung tengah dan Manggopoh.

Permasalahan yang terjadi dilapangan tentang penggunaan Aplikasi EPDESKEK seperti lambatnya akses atau fitur yang tidak berfungsi optimal. Kondisi ini memperlambat proses kerja dan menurunkan efektivitas penggunaan aplikasi, tidak semua desa memiliki perangkat keras (komputer, laptop) yang memadai dan spesifikasi yang cukup untuk mengoperasikan aplikasi EPDESKEK dengan lancar, Sering terjadi pergantian Operator atau Perangkat Desa yang tidak memiliki kompetensi memadai untuk mengoperasikan aplikasi. Hal ini memaksa desa untuk terus melakukan pelatihan ulang, yang kurang efisien. Serta Meskipun berbasis aplikasi, data sering kali masih diinput secara manual dari laporan di lapangan, yang meningkatkan risiko kesalahan input.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi aplikasi EPDESKEK dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengawasan Pemerintah Kabupaten Agam terhadap lima Nagari di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam dan untuk mengetahui Apakah aplikasi EPDESKEK dapat meningkatkan terwujudnya kualitas pengawasan yang ideal pada lima Nagari di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan cara menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di lapangandan mengkaitkannya dengan teori yang digunakan pada penelitian ini (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting bagi peneliti dalam melakukan penelitian Sugiyono (2018), diantaranya wawancara secara langsung dengan informan yang telah peneliti tetapkan, kemudian direkam menggunakan handphone, dan mencatat hasil wawancaranya, observasi berupa waktu, tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, dan peristiwa dan dokumentasi seperti sosialisasi EPDESKEK serta modul petunjuk pengisian EPDESKEK.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan direduksi untuk mengambil informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan bagaimana media sosial mempengaruhi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan data dengan rumusan masalah dan teori yang telah digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Permendagri No 81 tahun 2015 tentang Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) pada Nagari di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Dari komunikasi yang dilakukan, Sumber Daya, sikap pelaku kebijakan hingga Struktur Birokrasi telah terlaksana dengan baik. Tidak ada hambatan yang signifikan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan aplikasi ini dalam proses pengawasan perkembangan desa/kelurahan. Namun, perlu diperhatikan pada indikator Struktur Birokrasi dan Sumber Daya. Ketiadaan SOP pada bagian pemerintah kabupaten Agam dapat berpotensi mengacaukan proses Implementasi kebijakan.

Variabel komunikasi, yaitu:

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu Implementasi yang baik pula. Komunikasi dilakukan antara pembuat kebijakan tentang aplikasi EPDESKEL dengan pemerintah dibawahnya misalnya dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari sudah berjalan dengan baik.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Komunikasi yang dibuat dan diberikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten, Camat dan Pemerintah Nagari harus jelas agar menjadi pedoman dalam menjalankan aplikasi EPDESKEL.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Komunikasi yang diberikan harus konsisten, karena jika perintah yang diberikan sering berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan ketika menjalankan aplikasi EPDESKEL.

Variabel Sumber Daya, yaitu:

1. Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam Implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh Staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Staf yang menjalankan aplikasi EPDESKEL sudah mencukupi hanya saja kurang mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari Pemerintah Kabupaten.

2. Informasi

Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dalam hal ini aplikasi EPDESKEL dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi Pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah Nagari harus memastikan bahwa yang menjadi pelaksana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat normal agar Pemerintah dapat dilaksanakan. Kewenangan yang diberikan pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sudah kuat karena sudah diikuti dengan Peraturan Pemerintah sehingga sudah aman bila diterapkan oleh Pemerintah Nagari.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam Implementasi Kebijakan.

Dalam hal Fasilitas masih ada Pemerintah Nagari yang masih kurang, seperti tidak adanya jaringan yang memadai.

Variabel disposisi, yaitu:

1. Pengangkatan Birokrat

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-

orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Dalam hal ini untuk operator yang menjalankan aplikasi EPDESKEK diambil dari Kasi Pemerintahan dari masing-masing Nagari dan ada juga sesuai dengan kewenangan dari Walinagari tersebut.

2. Insentif

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Operator yang menjalankan aplikasi EPDESKEK mendapatkan insentif karena Pemerintah Nagari sudah menganggarkannya di APB Nagari masing-masing.

Variabel struktur birokrasi, yaitu:

1. Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih fleksibel

SOP adalah suatu prosedur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dalam hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintahan nagari karena sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data tahunan berjalan lancar, konsisten, dan akurat.

2. Melaksanakan fragmentasi

Pembagian data input dilakukan secara terstruktur Operator EPDESKEK melalui beberapa tahap menu utama. Penginputan data terbagi menjadi bidang-bidang spesifik untuk memudahkan evaluasi

Hambatan utama dalam pelaksanaan EPDESKEK sering kali berasal dari keterbatasan pemahaman aparaturnya maka dari itu perlunya pelatihan berkelanjutan, pendampingan intensif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam selaku Pembina Desa dan Kelurahan disini masih merasa belum puas dalam memaksimalkan kinerjanya. Walaupun sudah cukup signifikan peningkatan dari tahun ke tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memberikan beberapa usaha agar nantinya masalah-masalah dapat teratasi dengan baik.

Aplikasi EPDESKEK dapat meningkatkan terwujudnya kualitas pengawasan yang ideal pada lima Nagari di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Aplikasi EPDESKEK merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian dalam negeri. Namun, isi dari Aplikasi tersebut berfokus kepada aspek-aspek yang ada di ranah desa maupun kelurahan. Di dalam website tersebut pihak kelurahan mengisi kuesioner yang berisi tiga aspek antara lain Pemerintahan, Kewilayahan, dan Kemasyarakatan. Setelah Kuesioner diisi, maka akan muncul hasil nilai atau score yang menyatakan suatu daerah berkembang cepat atau lambat. Kemudian pemerintah pusat dapat memantau apa saja kebijakan yang dibutuhkan oleh desa tersebut berkaitan dengan mempercepat perkembangan desa.

Pengisian aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEK) sering kali menghadapi tantangan di mana prosesnya hanya dianggap sebagai beban administratif (formalitas) belaka, daripada alat pengawasan substansial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 pada lima nagari di Kecamatan Lubuk Basung secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya status perkembangan nagari menjadi kategori cepat berkembang, yang mencerminkan peningkatan pada aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Implementasi kebijakan ini juga mendorong pemerintah nagari untuk melakukan penataan kelembagaan, administrasi, dan tata kelola pemerintahan secara lebih modern sehingga kemajuan pembangunan nagari dapat diukur secara objektif. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan, keterbatasan kompetensi aparaturnya nagari dalam pengoperasian sistem, ketidakstabilan jaringan internet, serta belum konsistennya data

pendukung. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah kabupaten maupun provinsi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal.

Saran

Pemerintah Kabupaten Agam, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan kepada pemerintah nagari, disertai pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan evaluasi perkembangan desa sesuai pedoman yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah nagari perlu lebih proaktif dalam menyosialisasikan pentingnya tertib administrasi kepada masyarakat serta memastikan tersedianya dukungan anggaran yang memadai melalui APB Nagari maupun sumber pembiayaan lainnya, sehingga pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dapat berlangsung secara berkelanjutan, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hadi, (2021). *Penelitian Kualitatif : Studi Fenomena, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada
- Affrian, R. (2020). *Buku Penunjang Disertasi*. Grafindo Persada. Jakarta
- Agus Perdiansyah, Yayan Mulyana, and Agus Joko Purwanto. (2024) "Evaluasi Kebijakan Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Di Provinsi Kalimantan Utara". *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (February 18, 2647
- Agus Subianto, M. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant, PT Menuju Insan Cemerlang.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (Edisi 2). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewantara, Y. (2020). *Evaluasi Kebijakan Program Pendidikan Inkulif*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Edward III, C. George. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Fauzia, Amalia. (2020). *Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan Di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan*. Skripsi, Jurusan Administrasi Publik. Padang: Universitas Andalas
- Fiqh Haji Maburur. (2020). "Makna, Implementasi dan Implikasinya". *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman*, Vol. 1, No. 2
- Harbani Pasolong. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hafidh Sholahuddin Abdul Aziz. (2024). *Implementasi Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Studi Kasus Desa di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur)*
- Hasil Wawancara dengan Kabid Pemerintahan Nagari Bapak Zulkarnaini, SAP Pada hari senin Tanggal 22 Desember 2025.
- Hasil Wawancara dengan Walinagari Bapak Darmalion, S.Sos., M.M, dan Kasi Pemerintahan Nagari Garagahan Ibuk Eli Suryani Pada hari Selasa Tanggal 23 Desember 2025.
- Hasil Wawancara dengan Walinagari Kampung Pinang Bapak Roni, S.A.P dan Kasi Pemerintahan Nagari Kampung Pinang Ibuk Juniarti Pada hari Rabu Tanggal 24 Desember 2025.
- Hasil Wawancara dengan Walinagari Manggopoh Bapak Zahmasari dan Kasi Pemerintahan Nagari Manggopoh Bapak Hidayatullah, S.Psi Pada hari Senin Tanggal 5 Januari 2026.

- Hasil Wawancara dengan Walinagari Kampung Tengah Bapak Gusri Mulyadi, S. Hum dan Kasi Pemerintahan Nagari Kampung Tengah Ibuk Annisa Putri Bungsu, S.Pd Pada hari Selasa, Tanggal 6 Januari 2026.
- Hasil Wawancara dengan Walinagari Lubuk Basung Bapak Darma Ira Putra, S.E dan Sekretaris Nagari Lubuk Basung Ibuk Hidayati Amir, S.Pd Pada hari Rabu, Tanggal 7 Januari 2026.
- Herdiana. (2018). "Sosialisasi kebijakan publik: pengertian dan konsep dasar". *Stiacimahi.Ac.Id.* 13–25
- Herdiana D. (2019). "Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages". *IPTEK-KOM* 21 (1): 1 – 16.
- Keban, Y. T. (2018). *Pengantar administrasi Negara*, (cetakan ke-11). Rajawali Pers.
- Magdalena, Ina et al. 2020. "Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran dan Akibat Memanipulasinya." *Jurnal Pendidikan dan Sains* 2(2):244–57
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugraha, J. T. (2018). "E-Government dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan e-government di pemerintah kabupaten Sleman)". *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42
- Permatasari, I. A. (2020). "Kebijakan publik (teori, analisis, Implementasi dan evaluasi kebijakan)". *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Prabowo, R., Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). "Evaluasi Kebijakan Pendidikan". *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8).
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173–190
- Setiawan, I. (2023). "Implementasi Metode Triz Terhadap Peningkatan Kualitas Proses Roasting Kopi Pada UMKM Di Makassar". 9(2), 655–662
- Soimin, (2019), *Pembangunan Berbasis Desa*, Cetakan Pertama (Intrans Publishing), Malang, Jatim.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan. Development*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiani, A. (2018). *Hubungan Status Pekerjaan Ibu dan Stimulasi Orang Tuadengan Perkembangan Anak Usia Balita (1-5 Tahun) di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Juanda Samarinda*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Yuliah, E. (2020). "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies". *Jurnal At-tadbir (JAT): Media Hukum dan Pendidikan*, 131-132
- Yuyun, DwiLestari. (2025) *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Administrasi Desa Dan Kelurahan (Studi Kelurahan Sumberrejo Sejahtera Kecamatan Kemiling)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
- Zakky. (2018). Pengertian Strategi Pembelajaran Secara Umum dan Menurut Para Ahli. Tersedia pada laman web: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-strategi-pembelajaran/>.